

Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Swasembada Beras di Kabupaten Bekasi

¹Robbinov Dwi Ardi, ²Ina Helena Agustina

^{1,2} Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹robbinov.dwi.ardi@gmail.com, ²inasuratno@gmail.com

Abstrak. Kabupaten Bekasi merupakan salah satu daerah yang memiliki wilayah pertanian yang cukup luas yang ikut menyokong pangan dalam skala nasional. Namun perkembangan ekonomi di Kabupaten Bekasi telah mengakibatkan terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dari tahun 1988 sampai tahun 2010 dan mengidentifikasi dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap swasembada beras di Kabupaten Bekasi. Swasembada beras dilihat dari perbandingan produksi beras yang dihasilkan dengan konsumsi penduduk terhadap beras. Teknik analisis digunakan adalah analisis spasial dengan menggunakan ArcGIS untuk mengetahui alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi. Data luas lahan yang diambil dari peta penggunaan lahan Kabupaten Bekasi tahun 1988 hingga tahun 2010. Adapun perhitungan swasembada beras dilihat dari perbandingan produksi padi dengan jumlah konsumsi beras per kapita penduduk di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan analisis surplus defisit. Hasil perhitungan penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang cukup serius dari alih fungsi lahan pertanian terhadap swasembada beras di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional tidak swasembada beras.

Kata Kunci: Alih Fungsi, Lahan Pertanian, Swasembada Beras

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Secara fisiografis wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah yang berada pada zona Jakarta dengan topografinya yang datar. Sebagian besar keadaan tanahnya merupakan tanah alluvial yang subur untuk daerah pertanian. Oleh karena itu wilayah Kabupaten Bekasi merupakan wilayah pertanian bersama dengan wilayah Karawang, Subang, Indramayu dan Cirebon sebagai andalan Jawa Barat dalam produksi padi. Sebagai daerah pertanian wilayah kabupaten Bekasi selain ditunjang oleh kondisi iklim terutama curah hujan yang tinggi yaitu berkisar antara 2.000-2.500 mm/tahun juga sudah dilengkapi dengan saluran irigasi baik saluran primer, sekunder sampai tersier.

Karakteristik perkembangan penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Bekasi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan fungsional DKI Jakarta yang cenderung berkembang sebagai pusat pelayanan jasa, sementara di wilayah Botabek terjadi perkembangan industri. Secara timbal balik, kecenderungan perkembangan ini sangat berpengaruh pada pola perkembangan penggunaan lahan yang bersifat linier dan semakin intensif untuk membentuk jalur koridor barat-timur. Proses transformasi struktural di Wilayah Botabek sebagai penyangga DKI Jakarta pada dasarnya terjadi baik secara demografis (dari dominasi penduduk perdesaan ke perkotaan), ekonomi (dari dominasi sektor pertanian ke industri dan jasa), maupun secara fisik. Perkembangan fisik merupakan manifestasi perkembangan demografis dan ekonomi yang pada gilirannya perlu diakomodasikan dalam ruang. Memasuki tahun 1990-an di Kabupaten Bekasi telah banyak proyek yang dibangun yang menyerap ribuan tenaga kerja. Hal ini tidak terlepas dari sejak dikeluarkannya kebijaksanaan-kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi berupa penyederhanaan prosedur perijinan yang

memberikan hasil nyata yaitu meningkatnya jumlah investasi dan kegiatan industri di daerah tersebut. Apalagi dengan adanya keputusan presiden No.53 Tahun 1989 terutama untuk kawasan industri, serta alokasi lahan untuk kawasan industri seluas 3.000 Ha di Kabupaten Bekasi, sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.593/SK/BAPPEDA /Tahun 1990.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk Kabupaten Bekasi telah menunjukkan laju kenaikan yang signifikan, seiring lajunya investasi pembangunan terutama pada sektor industri dan perumahan. Pertambahan penduduk ini menyebabkan keperluan bangunan juga ikut bertambah. Tidak hanya bangunan rumah untuk tempat tinggal, tetapi juga infrastruktur lain yang mendukung masyarakat, seperti sekolah, perkantoran, rumah sakit, jalan raya dan sebagainya. Hal ini menjadi dilema dimana Kabupaten Bekasi yang cocok untuk pertanian pangan berhadapan dengan penduduknya yang terus bertambah dan membutuhkan bangunan untuk tempat tinggal, sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian. Saat ini menurut data Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2014, luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi sebesar 52.966 ha atau 41,58% dari luas Kabupaten Bekasi. Adanya alih fungsi lahan pertanian, khususnya pada lahan sawah, akan mempengaruhi produksi beras yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus akan berpengaruh pada swasembada beras, dimana masyarakat nantinya harus mengimport beras karena produksi dari sawah yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan sebagai akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis laju alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dari tahun 1988 sampai tahun 2010.
- 2) Mengidentifikasi dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap swasembada beras di Kabupaten Bekasi.

B. Landasan Teori

1. Lahan Pertanian

Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Sebagai sumberdaya alam, lahan merupakan wadah dan faktor produksi strategis bagi kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

Sumberdaya lahan merupakan salah satu sumberdaya alam yang memiliki banyak manfaat dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia, seperti sebagai tempat tinggal, tempat mencari nafkah, tempat berwisata, dan tempat bercocok tanam. Lahan mempunyai arti penting bagi masing-masing orang yang memanfaatkannya. Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian.

2. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau konversi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lainnya, sehingga permasalahan yang timbul banyak terkait dengan kebijakan tata guna lahan (Ruswandi, 2005). Alih fungsi lahan ini secara umum menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Hal ini umumnya terjadi di wilayah sekitar

perkotaan dan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan isu yang perlu diperhatikan karena ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian, terutama pangan. Dalam kegiatan alih fungsi lahan sangat erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran lahan, dimana penawaran atau persediaan lahan sangat terbatas sedangkan permintaan lahan yang tidak terbatas. Menurut Barlowe (1978), faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi, dan faktor kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi, pendidikan dan kebudayaan, selera dan tujuan, serta perubahan sikap dan nilai yang disebabkan oleh perkembangan usia.

3. Swasembada Beras

Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Beras merupakan bahan pangan pokok yang sampai saat ini masih dikonsumsi oleh sekitar 90% penduduk Indonesia, dan yang menyumbang lebih dari 50% kebutuhan kalori serta 55% kebutuhan protein.

Selain sebagai bahan pangan pokok, beras juga sudah merupakan komoditi sosial. Swasembada beras adalah kemampuan suatu wilayah dalam memenuhi kebutuhan beras nya berdasar hasil produksi sendiri. Kebutuhan beras ini dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan penduduk. Pola konsumsi makanan penduduk merupakan salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan setempat.

C. Metode

Metode analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Spasial

Analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik operasi tumpang-tindih (overlay) yang dilakukan dengan cara menumpang-tindihkan peta penggunaan lahan tahun 1988, 1995, 2008 dan peta penggunaan lahan tahun 2010. Untuk menentukan satuan penggunaan lahan digunakan 7 (tujuh) jenis penggunaan lahan yakni: (1) sawah, (2) ladang/tegalan, (3) hutan sekunder, (4) perkebunan/kebun, (5) padang rumput/alang-alang, (6) lahan terbangun dan (7) badan air.

2. Analisis Laju Alih Fungsi Lahan

Menurut Sutani (2009) dalam Astuti (2011), dalam perhitungan laju alih fungsi lahan pertanian digunakan persamaan penyusutan lahan. Laju alih fungsi lahan dapat ditentukan dengan cara menghitung laju penyusutan lahan secara parsial. Laju penyusutan lahan secara parsial dapat dijelaskan secara berikut:

$$V = \frac{L_t - L_{t-1}}{L_{t-1}} \times 100\%$$

dimana:

V = Laju penyusutan lahan (%);

L_t = Luas lahan tahun ke-t (ha);

L_{t-1} = Luas lahan tahun sebelum t (ha).

Laju alih fungsi lahan dapat ditentukan melalui selisih antara luas lahan tahun ke-t dengan luas lahan tahun sebelum t (t-1). Kemudian dibagi dengan luas tahun sebelum t tersebut dan dikalikan dengan 100 persen. Hal ini dilakukan juga pada tahun-tahun berikutnya sehingga diperoleh laju alih fungsi lahan setiap tahun. Nilai V

< 0 berarti bahwa luas lahan tersebut mengalami penyusutan.

3. Analisis Surplus Defisit

Tujuan penggunaan analisis surplus defisit adalah untuk mengetahui keberadaan beras di Kabupaten Bekasi, apakah bersifat surplus atau defisit. Analisis ini membandingkan antara produksi beras yang dihasilkan di Kabupaten Bekasi dengan konsumsi penduduk Kabupaten Bekasi terhadap beras. Rumus kebutuhan konsumsi adalah sebagai berikut:

$$K_k = S_k \times y_t$$

dimana:

K_k = kebutuhan konsumsi penduduk (kg/kapita/tahun);

S_k = standar konsumsi, bernilai 99 kg/kapita/tahun;

y_t = Jumlah penduduk tahun ke - t (jiwa).

Selanjutnya kebutuhan konsumsi terhadap beras dikonversi menjadi kebutuhan terhadap gabah dengan rumus sebagai berikut:

$$K_g = K_k \times 100/62,74$$

dimana:

K_g = kebutuhan gabah (kg/kapita/tahun);

K_k = konsumsi beras (ton/kapita/tahun);

Nilai 62,74 adalah faktor konversi beras ke gabah berdasarkan pada hasil survei susut panen dan pasca panen gabah beras kerjasama BPS dan Kementan (2009).

4. Analisis Kebutuhan Luas Lahan

Analisis ini digunakan dengan tujuan untuk mengetahui luas lahan sawah yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksi padi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$K_s = K_g/P_g$$

dimana:

K_s = Kebutuhan lahan sawah (ha)

K_g = Kebutuhan gabah (ton)

P_g = Produksi gabah per hektar (ton/tahun), dimana:

$$P_g = Q_t \times IP$$

dimana:

P_g = Produksi gabah per hektar (ton/tahun)

Q_t = Produktivitas (ton/ha)

IP = Intensitas Pertamanan, dimana:

$$IP = \frac{\text{Luas tanam padi dalam 1 tahun}}{\text{luas lahan sawah}}$$

D. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Perubahan Lahan

Angka penyusutan berarti bahwa luasan lahan pertanian yang berubah fungsi tidak dapat lagi diimbangi dengan penambahan luas atau pencetakan lahan sawah baru. Dalam kurun 1988 – 2010 di Kabupaten Bekasi terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 931,02 ha per tahun. Sedangkan laju alih fungsi lahannya sebesar - 22,61%, maka ini mengidentifikasi terjadinya penyusutan lahan pertanian. Laju penyusutan yang terbesar terjadi di Kecamatan Cikarang Selatan yaitu sebesar 73,95%, Kecamatan Serang Baru sebesar 67,18% dan Kecamatan Cikarang Utara

sebesar 63,81%.

Secara rinci perkembangan lahan pertanian di Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Penyusutan Luas Lahan Pertanian Sawah di Kabupaten Bekasi

No	Kecamatan	Luas Lahan Sawah (ha)				Rata-Rata Penyusutan Per Tahun (ha)	Laju Penyusutan Lahan (%)
		1988	1995	2008	2010		
1	Setu	2.254,59	2.226,48	1.626,70	1.766,84	-24,39	-21,63
2	Serang Baru	4.255,10	4.170,77	2.993,13	1.396,57	-142,93	-67,18
3	Cikarang Pusat	3.950,01	3.916,72	1.824,41	1.550,84	-119,96	-60,74
4	Cikarang Selatan	2.282,46	2.321,63	1.229,81	594,50	-84,40	-73,95
5	Cibarusah	2.952,77	2.817,66	2.736,27	2.221,89	-36,54	-24,75
6	Bojong Mangu	3.236,28	3.236,34	3.163,05	3.372,39	6,81	4,21
7	Cikarang Timur	3.943,19	3.946,05	3.546,49	2.991,21	-47,60	-24,14
8	Kedungwaringin	2.273,23	2.272,78	2.283,99	2.019,80	-12,67	-11,15
9	Cikarang Utara	1.632,96	1.662,53	1.446,75	590,99	-52,10	-63,81
10	Karangbahagia	3.732,90	3.732,61	3.703,67	2.516,27	-60,83	-32,59
11	Cibitung	3.305,81	3.255,54	2.466,06	2.839,68	-23,31	-14,10
12	Cikarang Barat	2.367,85	2.646,02	457,93	1.274,42	-54,67	-46,18
13	Tambun Selatan	1.765,82	1.403,18	1.317,84	985,75	-39,00	-44,18
14	Tambun Utara	2.658,10	2.498,83	2.290,56	2.042,31	-30,79	-23,17
15	Babelan	4.559,95	4.542,27	3.924,19	3.329,79	-61,51	-26,98
16	Tarumajaya	4.198,16	4.232,61	3.856,64	4.049,49	-7,43	-3,54
17	Tambelang	3.130,84	3.125,55	3.126,29	2.039,30	-54,58	-34,86
18	Sukawangi	6.327,47	6.333,08	6.299,45	5.451,73	-43,79	-13,84
19	Sukatani	3.318,27	3.318,15	3.314,38	2.315,94	-50,12	-30,21
20	Sukakarya	4.387,81	4.389,47	4.382,99	4.285,31	-5,13	-2,34
21	Pebayuran	8.217,00	8.086,23	8.310,24	8.038,12	-8,94	-2,18
22	Cabangbungin	4.165,30	4.149,71	4.187,73	2.085,39	-104,00	-49,93
23	Muaragembong	3.429,27	5.766,56	3.419,84	5.966,29	126,85	73,98
Kabupaten Bekasi		82.345,16	84.050,77	71.908,40	63.724,82	-931,02	-22,61

Sumber: Hasil Analisis, 2015

2. Analisis Surplus Defisit

Menurut data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 konsumsi beras perkapita penduduk Indonesia sebesar 114 kg per tahun. Jika di konversi ke Gabah Kering Giling (GKG), maka kebutuhan per kapita penduduk Kabupaten Bekasi adalah 181,70 kg/kapita/tahun (angka faktor konversi Gabah Kering Giling ke beras adalah 62,74%). Selanjutnya dari Gabah Kering Giling (GKG) ke Gabah Kering Panen (GKP) dengan angka konversi 83,12%, maka kebutuhan Gabah Kering Panen (GKP) per kapita penduduk Kabupaten Bekasi adalah 218,60 kg/kapita/tahun.

Produksi padi di Kabupaten Bekasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 sebesar 610.203 ton. Penduduk Kabupaten

Bekasi pada tahun 2013 sebesar 3.002.112 jiwa, maka kebutuhan Gabah Kering Panen (GKP) penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2010 sebesar 656.261.683,2 kg atau 656.261,68 ton. Jika dibandingkan dengan produksi padi, maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bekasi mengalami defisit beras. Jika diproyeksikan kedepan, dengan luas lahan sawah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 2011-2031 seluas 35.173,97 ha akan memperbesar defisit beras di Kabupaten Bekasi. Untuk lebih jelasnya analisis surplus defisit gabah di Kabupaten Bekasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.2 Analisis Surplus Defisit Gabah di Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Produksi Padi (ton)	Konsumsi Gabah (ton)	Surplus (+) /Defisit (-) (ton)
2004	1.950.209	585.357	426.315,69	159.041,31
2005	2.027.902	528.794	443.299,38	85.494,62
2006	2.054.795	553.292	449.178,19	104.113,81
2007	2.125.960	573.411	464.734,86	108.676,14
2008	2.193.856	586.374	479.576,92	106.797,08
2009	2.274.842	665.884	497.280,46	168.603,54
2010	2.630.401	628.939	575.005,66	53.933,34
2011	2.753.961	636.572	602.015,87	34.556,13
2012	2.786.548	597.939	609.139,39	-11.200,39
2013	3.002.112	610.203	656.261,68	-46.058,68
Proyeksi Penduduk				
2015	3.206.295	400.983,26	700.896,09	-299.912,83
2020	3.609.268	400.983,26	788.985,98	-388.002,73
2025	4.092.832	400.983,26	894.693,08	-493.709,82
2030	4.576.396	400.983,26	1.000.400,17	-599.416,91

Sumber: Hasil Analisis, 2015

3. Analisis Kebutuhan Lahan Sawah

Jumlah penduduk yang selalu meningkat di Kabupaten Bekasi mengakibatkan terjadinya defisit beras. Dengan mengetahui produksi gabah rata-rata per hektar dan kebutuhan gabah dapat diketahui kebutuhan luas lahan sawah ideal agar Kabupaten Bekasi swasembada beras.

$$IP = \frac{92.550 \text{ ha}}{52.966 \text{ ha}}$$

$$IP = 1,82$$

$$\text{Produksi gabah per hektar} = 5,2 \times 1,82$$

$$\text{Produksi gabah per hektar} = 9,46 \text{ ton/ha}$$

$$\text{Kebutuhan lahan sawah} = 609.139,39/9,46$$

$$\text{Kebutuhan lahan sawah} = 64.363,84 \text{ ha}$$

Kebutuhan sawah Kabupaten Bekasi agar swasembada beras pada tahun 2012 adalah 64.363,84 ha, atau kurang 11.367,84 ha dari luas lahan sawah di Kabupaten Bekasi pada tahun 2012 yaitu sebesar 52.966 ha. Untuk kebutuhan luas lahan sawah pada tahun-tahun lainnya agar Kabupaten Bekasi swasembada beras dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3 Kebutuhan Luas Lahan Sawah di Kabupaten Bekasi

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kebutuhan Gabah (ton/tahun)	Produksi Per Tahun (ton)	Kebutuhan Luas Lahan Sawah (ha)
2012	2.786.548	609.139,39	9,46	64.391,06
2013	3.002.112	656.261,68	9,46	69.372,27
2015	3.206.295	700.896,09	9,46	74.090,50
2020	3.609.268	788.985,98	9,46	83.402,32
2025	4.092.832	894.693,08	9,46	94.576,44
2030	4.576.396	1.000.400,17	9,46	105.750,55

Sumber: Hasil Analisis, 2015

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laju penyusutan lahan pertanian sawah selama kurun waktu 1988-2010 yaitu 22 (dua puluh dua) tahun terakhir di Kabupaten Bekasi sebesar 22,61% atau seluas 931,02 ha per tahunnya.
2. Tidak terjadi swasembada beras lagi Kabupaten Bekasi mulai dari tahun 2012, yaitu terjadi kekurangan kebutuhan gabah sebesar 11.200,39 ton.

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi 2011-2031 yang menetapkan luas lahan pertanian yang hanya sebesar 35.173,97 ha dikarenakan ditetapkannya Kabupaten Bekasi sebagai wilayah penyangga PKN Jabodetabek yang ruang wilayahnya diperuntukkan untuk permukiman, industri dan jasa. Karena faktor tersebut tidak terkendalinya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bekasi yang menyebabkan besarnya penduduk Kabupaten Bekasi yang juga memerlukan kebutuhan pangan, salah satunya beras. Dengan luas lahan pertanian sawah sebesar 35.173,97 ha tidak akan mencukupi kebutuhan beras. Idealnya untuk memenuhi swasembada beras di Kabupaten Bekasi maka dibutuhkan lahan seluas 105.750,55 ha atau Kabupaten Bekasi kekurangan lahan pertanian sawah sebesar 70.576,58 ha.

Daftar Pustaka

- Ruswandi A. 2005. Dampak Konversi Lahan Pertanian Perubahan Kesejahteraan Petani dan Perkembangan Wilayah. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Barlowe R. 1978. Land Resources Economics: The Economics of Real Estate. Prentice-Hall. New Jersey.
- Astuti D. 2011. Keterkaitan Harga Lahan Terhadap Laju Konversi Lahan di Hulu Sungai Ciliwung Kabupaten Bogor. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Agus H Atmadilaga dan Dodi Sukjadi. 1998. Pemetaan Citra Satelit (Space Map) sebagai Pemacu Industri Jasa Penginderaan Jauh dan SIG di Indonesia. Jakarta: Direktorat Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam BPPT.
- Badan Informasi Geospasial, (2015). Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bekasi Tahun 1988-2010.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bekasi, (2012). Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi 2012-2017.

Badan Pusat Statistik, 2015. Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2009-2014. Bekasi: BPS Kabupaten Bekasi.

Ivan Chofyan dan Ade Sofyan. 2014. Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Menciptakan Nilai Tambah dalam Pembangunan Berkelanjutan. Universitas Islam Bandung. Bandung.

Kabupaten Bekasi. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi. Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi. Cikarang.

